

Implementasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Binjai

Ikhwa Sasmitha

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email: ikhwasasmitha@students.usu.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang terus dicari jalan keluarnya. Salah satu faktor pemicu tingginya angka kemiskinan ialah masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Hal ini diperparah dengan adanya bencana pandemi Covid-19, yang mana salah satunya berdampak pada bidang ekonomi dan mengakibatkan tingginya tingkat PHK di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengeluarkan program Kartu Prakerja. Namun kenyataan di lapangan masih banyak kendala dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Binjai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Binjai sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kendala yang dialami masyarakat diantaranya yaitu, masalah jaringan internet, *error* pada website Kartu Prakerja, masyarakat yang kurang cakap digital, serta video materi yang terkesan monoton dan membosankan.

Kata Kunci: Kartu Prakerja, Implementasi, Program

Abstract

Poverty is a global problem that continues to find a way out. One of the factors triggering the high poverty rate is that there are still many people who experience unemployment at work. This is exacerbated by the Covid-19 pandemic disaster, one of which has an impact on the economic sector and has resulted in high levels of layoffs in almost all regions of Indonesia. One of the government's efforts in overcoming this problem is by issuing the Kartu Prakerja program. However, in reality there are still many obstacles in the implementation of the Kartu Prakerja program. This study aims to determine how the implementation of the Kartu Prakerja program in Binjai City. The data collection techniques used were observation and interviews. Based on the research that has been conducted, the results of this study indicate that the implementation of the Kartu Prakerja program in Binjai City has been carried out quite well. The obstacles experienced by the community include internet network problems, errors on the Kartu Prakerja website, people who are less digitally proficient, and video material that seems monotonous and boring.

Keywords: Kartu Prakerja, Implementation, Program

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus menerus dicari jalan keluarnya. Bukan tanpa alasan, hal ini mengingat angka kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, yaitu sebanyak 26,16 juta orang dari total 275,77 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka tersebut cukup menggambarkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dalam kekurangan. Di tengah pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah, rasanya tidak adil membiarkan masyarakat hidup dengan kondisi yang dibawah kata layak.

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis tersebut didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan minimum untuk memperoleh: (i) sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori tertentu; dan (ii) pengeluaran bukan makanan minimum untuk hidup secara layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ialah pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang rendah dan terjadi ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran dalam suatu putaran ekonomi seorang individu, maka ia mengalami kondisi lemah secara finansial yang dapat menyebabkan ia masuk dalam golongan ekonomi rendah atau miskin. Maka dari itu, pekerjaan menjadi hal yang penting bagi seseorang untuk memberikan pendapatan baginya agar ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengangguran menjadi masalah serius yang harus segera ditangani agar tidak menambah parah angka kemiskinan di Indonesia.

Dikutip dari laporan doing bisnis di Indonesia, World Bank dan IFC (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yaitu kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purna dkk (2010) rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi karena *Link and Match* (keterkaitan dan kecocokan) antara dunia pendidikan dan dunia usaha belum berjalan dengan baik dan masih banyak permasalahan –permasalahan yang lainnya.

Faktor lain yang dapat meningkatkan angka pengangguran adalah kondisi lingkungan di sebuah negara. Dengan adanya wabah *coronavirus* menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat. Perusahaan banyak yang terus melakukan proses produksinya tetapi tidak dapat dibarengi dengan pemasukan atau pendapatan. Sehingga, perusahaan tidak dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Perusahaan, pada akhirnya memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan. Karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non formal (Indayani & Hartono, 2020).

Berdasarkan kompilasi administrasi yang dilakukan oleh Pusdatinaker terhadap pihak-pihak terkait, sekitar 2.265.366 orang yang terdampak Covid-19. Hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, sejak April 2020 sampai dengan Juli 2020, tercatat sekitar 2.175.928 pekerja yang terdampak. Mereka yang terdampak Covid-19 terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar. Pekerja dari sektor formal yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (ter-PHK) sebanyak 387.877 orang. Pekerja formal yang dirumahkan sejumlah 1.155.630 orang. Serta dari sektor nonformal, pekerja informal atau yang mengalami kebangkrutan maupun kehilangan usaha tercatat sebanyak 633.421 orang. Peserta magang di Jepang yang dipulangkan sebanyak 465 orang. Hasil pendataan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui SISKOP2MI diketahui bahwa dari registrasi periode Januari – Maret 2020 terdapat 88.973 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdampak penghentian sementara akibat diterbitkannya Kepmen 151 Tahun 2020. Adapun data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19 tercatat dari Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 12.935 orang ter-PHK. Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa Covid-19 berdampak pada sektor perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Para karyawan atau pegawai banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya ditengah ketidakstabilan ekonomi negara bahkan dunia (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2022).

Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19. Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring.

Salah satu program unggulan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya membantu kondisi perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 adalah program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Adapun tujuan Program Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja serta meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Program Kartu Prakerja ini dibawah payung hukum Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Masyarakat yang mendaftar Program Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat berupa pelatihan kerja dan insentif. Insentif diberikan untuk pelatihan meringankan biaya mencari kerja dan evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Insentif kartu prakerja terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. Lalu ada Insentif biaya mencari kerja sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta. Selain itu, juga ada insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei sehingga total Rp150.000.

Pemerintah memberikan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Indonesia guna membantu dalam menjangkau program kesejahteraan rakyat. Bantuan sosial ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial. Dengan adanya bantuan sosial ini maka memberikan dampak bagi masyarakat yang menerima bantuan, dampak yang terjadi dari penyaluran bantuan sosial yaitu mampu mendorong pergerakan ekonomi dengan membelanjakan bantuan sosial yang sudah didapatkan (Suharto, 2006).

Segala upaya yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk penyaluran bantuan sosial, meluncurkan program kartu prakerja, dan program lainnya adalah untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada rakyatnya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dibentuk dalam rangka “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja pastilah memiliki prosedur dan alur yang sudah dirancang sedemikian rupa. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah pelaksanaa program tersebut sudah cukup efektif dan efisien dilaksanakan di masyarakat sasaran, atau malah justru kurang efektif dan tidak memberikan dampak di masyarakat. Salah satu hal yang menguatkan keraguan ini bahwa didapati fakta tidak adanya monitoring dari pemerintah secara langsung ke lapangan, untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah program tersebut mampu meningkatkan penghasilan dan keterampilan dari masyarakat yang mengikutinya atau malah melenceng dari tujuan dibuatnya program. Adapun upaya evaluasi yang dilakukan pemerintah hanya berupa survei yang bisa dilihat berupa data saja, namun tidak dengan melihat langsung kondisi nyata di lapangan seperti apa. Disamping itu terdapat beberapa potret pengimplementasian pelaksanaan program yang menimbulkan argumen dan kritikan yang berujung pada keraguan akan sustansibilitas program di masyarakat.

Penyaluran bantuan haruslah dibarengi dengan pertimbangan yang matang dan tepat sasaran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak bantuan sosial yang diberikan kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan masalah sosial baru yang harus segera diatasi. Penyaluran bantuan Program Kartu Prakerja juga perlu dianalisis mengenai proses pengimplementasian pelaksanaan program di masyarakat. Dirasa penting untuk melakukan analisa lebih lanjut agar mampu menguraikan bagaimana potret-potret pengimplementasian pelaksanaan program dari awal hingga berakhirnya program di masyarakat, yang mana kiranya dapat mengungkap fakta akan baik buruknya proses pengimplementasian program Kartu Prakerja ini. Dengan begitu, pemerintah mempunyai bahan pertimbangan untuk mendesain ulang program menjadi lebih efektif dan efisien di masyarakat.

Kota Binjai adalah salah satu kota penting di Sumatera Utara. Dikatakan penting karena Binjai terletak di daerah strategis dimana Kota Binjai sendiri merupakan pintu gerbang Kota Medan menuju Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Binjai adalah 214.080 orang, terdiri dari 139.445 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 74.635 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Sedangkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan (Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2022).

TPAK Binjai 2020 adalah sebesar 65,14 persen, artinya bahwa pada tahun 2020 sebanyak 65,14 persen penduduk usia kerja di Binjai siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 66,89 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 di Binjai sebesar 8,67 persen, meningkat dibanding tahun 2019 (6,14 persen) (Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pra penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diketahui bahwa pada tahun 2020, terhitung dari gelombang 1 sampai dengan

gelombang 11, terdapat total 6.872 orang masyarakat kota Binjai yang tercatat sebagai penerima program kartu prakerja.

Dari banyaknya masyarakat kota Binjai yang menjadi penerima program kartu prakerja, pastilah memiliki perspektif dan sudut pandang mereka masing-masing mengenai fakta di lapangan terkait proses pelaksanaan program kartu prakerja di masyarakat. Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana potret pelaksanaan program kartu prakerja ini di masyarakat. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan keefektifitasan dan keefisienan program bagi masyarakat.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi bantuan sosial yang ada di Kota Binjai, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Di Kota Binjai”.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (state of the art) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Dengan melibatkan masyarakat penerima program Kartu Prakerja, Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, serta masyarakat Kota Binjai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia itu sendiri. Untuk memperoleh data-data dengan penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian dan berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Binjai.

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Adapun karakteristik dari sampel pada penelitian ini adalah:

1. Tercatat sebagai penerima program Kartu Prakerja pada gelombang pertama.
2. Merupakan masyarakat Kota Binjai dan tinggal di Kota Binjai.
3. Mengetahui alur pelaksanaan program Kartu Prakerja.
4. Menyelesaikan program Kartu Prakerja hingga akhir.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil pra penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, masyarakat Kota Binjai yang lolos sebagai penerima program Kartu Prakerja pada gelombang pertama sebanyak 135 orang.

Penelitian ini juga menggunakan teknik *Snawball Sampling*. Peneliti menggunakan teknik *snawball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *snawball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informasi lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219).

Dikarenakan informasi data penerima program Kartu Prakerja yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai hanya berupa nama dan NIK (Nomor Induk KTP), maka peneliti sulit untuk menjangkau informan tanpa mengetahui nomor telepon ataupun alamatnya. Sehingga untuk efisiensi waktu dan efektivitas kinerja, peneliti berusaha menjangkau informan dengan bertanya kepada informan yang sudah peneliti ketahui sebelumnya dari kekerabatan, apakah ia mengetahui penerima program lain yang juga lolos dalam program Kartu Prakerja gelombang pertama. Adapun pendalaman informan dihentikan apabila ditemui data jenuh atau jawaban daripada wawancara bersama informan cenderung konsisten dan sama.

Maka informan dalam penelitian ini terdiri dari dua informan kunci yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, empat informan utama yaitu masyarakat Kota Binjai yang lolos sebagai penerima program Kartu Prakerja, dan dua orang informan tambahan yaitu kerabat atau tetangga penerima program Kartu Prakerja di Kota Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konsepsional, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro). Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan Wibawa, dkk., (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi, tujuan akhir dari sebuah pengimplementasian program adalah tercapainya tujuan dari program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang.

Adapun pemahaman umum mengenai implementasi program atau implementasi kebijakan dapat dilihat dari pernyataan Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan program di masyarakat dibutuhkan fokus pembahasan yang khusus agar analisa yang dilakukan lebih terarah dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti mengambil pemikiran Grindle dan Quade sebagai patokan. Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu program atau kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Sehingga, untuk mengukur implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Binjai, peneliti menggunakan variabel proses pelaksanaan program, organisasi atau kelompok pelaksana, dan kelompok sasaran.

1. Kebijakan Program Kartu Prakerja

Pembuatan program sosial di masyarakat haruslah dibarengi dengan kebijakan yang mengatur jalannya program, sehingga program dapat terlaksana dengan jelas dan terarah serta bersifat sistematis. Begitupun dengan program pemerintah Kartu Prakerja yang dirilis pada April tahun 2020. Diluncurkannya program Kartu Prakerja di masyarakat juga dibarengi dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sehingga pihak penyelenggara program memiliki acuan dalam proses pelaksanaannya, serta mampu mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Maka dari itu, perlu diperhatikan apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh pihak penyelenggara program atau tidak, yang mana dapat menjadi ukuran bagi tercapainya tujuan dan target sasaran program.

Kebijakan mengenai program Kartu Prakerja mengalami beberapa kali perubahan dalam perumusannya. Dikarenakan peneliti mengambil fokus pada pengimplementasian program Kartu Prakerja pada gelombang pertama, yaitu pada April tahun 2020, maka kebijakan yang paling relevan digunakan yaitu Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di samping itu, mengenai kebijakan pelaksanaan program Kartu Prakerja dirinci kembali dan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Peraturan Menteri tersebut juga beberapa kali mengalami perubahan. Dalam hal ini yang paling relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kebijakan yang dimaksud disini ialah rangkaian proses pelaksanaan program yang telah dituang dalam peraturan yang berlaku, dan kemudian ditransformasikan kedalam pola-pola atau prosedur-prosedur pelaksanaan kegiatan program Kartu Prakerja. Adapun prosedur-prosedur tersebut akan diuraikan sebagai berikut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa untuk bisa mendapatkan fasilitas dari program Kartu Prakerja, masyarakat diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu di website prakerja.go.id dengan melengkapi data diri dan berkas yang diperlukan. Calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja dan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui instansi pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain, baik secara individual maupun kolektif.

Kemudian, setelah proses pendaftaran dan pengisian data selesai, maka masyarakat calon penerima program Kartu Prakerja diarahkan untuk mengisi soal yang telah disediakan sebagai bagian dari proses seleksi. Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus verifikasi dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana yang mencakup tes pengetahuan dasar dan motivasi.

Setelah itu, masyarakat yang lolos seleksi akan ditetapkan sebagai penerima program Kartu Prakerja dan diinformasikan melalui email yang tercantum di akun Kartu Prakerja pada saat pendaftaran. Pendaftar program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana. Penyampaian hasil penetapan diumumkan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah peserta menyelesaikan seleksi.

Selanjutnya, masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima program Kartu Prakerja akan otomatis mendapatkan saldo pelatihan di akun mereka. Saldo tersebut digunakan untuk membeli pelatihan melalui berbagai platform digital yang sudah tersedia di website Kartu Prakerja.

Kemudian, penerima program Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka yang tersedia di website Kartu Prakerja. Penerima Kartu Prakerja memilih jenis pelatihan dan lembaga pelatihan melalui Platform Digital, setelah itu diberikan notifikasi pelaksanaan pelatihan oleh platform digital, lalu dapat langsung mengikuti pelatihan sesuai jadwal, jenis, dan tempat pelatihan yang telah ditentukan. Penerima program Kartu Prakerja melakukan pelatihan online tersebut dengan menonton video yang berisi materi pelatihan yang mereka pilih. Disini mereka harus menyelesaikan rangkaian pelatihan mereka hingga akhir. Apabila penerima program Kartu Prakerja tidak menyelesaikan pelatihan, mereka akan dicabut kepesertaannya dalam Program Kartu Prakerja. Akun mereka akan dihapus dan saldo pelatihan mereka akan otomatis hangus.

Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan online, penerima program Kartu Prakerja akan diarahkan untuk mengisi ulasan terkait dengan Kartu Prakerja. Setelah itu, barulah penerima program Kartu Prakerja akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan juga uang insentif yang dicairkan pada jadwal tertentu.

2. Organisasi atau Kelompok Pelaksana

Organisasi atau kelompok pelaksana juga memiliki peran penting dalam pengimplementasian pelaksanaan program Kartu Prakerja. Adapun dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ini diselenggarakan oleh Komite Cipta Kerja yang dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, semua proses pelaksanaan program Kartu Prakerja diselenggarakan langsung oleh pemerintah pusat dengan penyelenggara terkait. Pemerintah daerah tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program di lapangan. Informan kunci 1 selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai menjelaskan bahwa meskipun secara susunan birokrasi pelaksana program Kartu Prakerja Kementerian Ketenagakerjaan terlibat didalamnya, Disnaker Kota Binjai tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan kunci 2 selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Peindustrian Perdagangan Kota Binjai yang menjelaskan bahwa Disnaker memang tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja namun bertindak sebagai partner yang dapat membantu saat dibutuhkan, baik dalam memfasilitasi atau menjadi perantara apabila memerlukan pelatihan secara luring di masyarakat.

Memperjelas pernyataan informan kunci 2, beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa bantuan tersebut juga terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan arahan serta bimbingan pada saat terjadi hambatan dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja atau pada saat pelatihan berlangsung. Disamping itu, Disnaker Kota Binjai juga melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat dan memperkenalkan program Kartu Prakerja di Masyarakat dan membantu masyarakat yang ingin mendaftar program Kartu Prakerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi atau kelompok pelaksana sudah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Amanah yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sudah dijalankan semaksimal mungkin demi kelancaran pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kota Binjai.

3. Kelompok Sasaran

Masyarakat sebagai kelompok sasaran juga mengambil peran penting dalam mengukur keberhasilan suatu program. Target group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Seberapa jauh masyarakat dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada masyarakat Kota Binjai yang lolos dalam program Kartu Prakerja gelombang pertama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Kota Binjai memberikan respon positif terhadap dikeluarkannya program Kartu Prakerja ini. Hal ini sesuai dengan keterangan wawancara yang peneliti dapatkan dari informan utama 1, 2, 3 dan 4. Keempat informan utama menuturkan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mereka. Uang insentif yang mereka terima sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi pada saat mereka mengikuti program ini sedang dalam keadaan pandemi Covid-19. Jadi, uang insentif yang mereka dapatkan sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah keterbatasan dan kekurangan pada saat itu.

Disamping itu, pelatihan yang mereka ikuti dari program Kartu Prakerja juga membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Materi yang diberikan cukup informatif dan mudah dimengerti. Jenis pelatihan yang tersedia sangat beragam dan dekat dengan keseharian masyarakat. Sehingga tidak sulit untuk dipelajari.

Terlepas dari itu, masyarakat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Yang paling dominan dikeluhkan ialah gangguan sinyal atau jaringan internet. Dikarenakan pelatihan dilakukan secara daring, maka kekuatan jaringan internet menjadi hal yang penting. Apabila jaringan internet yang tersedia tidak bagus, maka materi yang dilihat melalui video online juga tidak dapat diputar secara maksimal dan mengganggu proses pelatihan.

Selanjutnya, kesiapan website yang kurang matang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, diketahui bahwa beberapa kali website Kartu Prakerja mengalami *down* atau *error*. Hal ini disinyalir ada kemungkinan karena banyaknya masyarakat yang masuk secara bersamaan ke website yang sama.

Terlebih lagi, terdapat kendala pada aksesibilitas di masyarakat. Dikarenakan semua proses pelaksanaan program dilakukan secara daring, beberapa masyarakat mengeluhkan karena tidak memiliki *smartphone* yang mumpuni untuk melakukan pelatihan secara daring. Ditambah lagi tidak semua masyarakat Kota Binjai cakap teknologi digital. Hal ini berakibat tidak dapat terlaksananya pelatihan secara maksimal.

Maka dari itu, meskipun masyarakat memberikan respon positif terhadap dikeluarkannya program Kartu Prakerja ini, namun di lapangan masyarakat belum mengimplementasikan pelaksanaan program Kartu Prakerja secara maksimal. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak penyelenggara agar kedepannya dapat memberikan solusi dan memperbaiki kekurangan program menjadi lebih baik lagi. Dikarenakan hal ini dapat berdampak pada output ataupun tujuan yang sudah dirancang di awal perencanaan program.

4. Keterkaitan Penelitian Dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Midgley dalam Adi (2018: 23) melihat Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan pada pengertian Kesejahteraan Sosial yang dikemukakan oleh Midgley tersebut, maka Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (termasuk didalamnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan) (Adi, 2018).

Dari definisi ini dapat terlihat bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan :

1. Ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata (bersifat terapan);
2. Kajian baik secara teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup (derajat kehidupan) suatu masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini, yang mana mengkaji tentang program Kartu Prakerja, salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk berkembang, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Maka dari itu, kajian tentang program Kartu Prakerja termasuk dalam garapan bidang Kesejahteraan Sosial.

Disamping itu, dalam praktiknya, profesi pekerjaan sosial tentunya membutuhkan metode dan teknik untuk dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Fahrudin (2014: 71) bahwa secara tradisional profesi pekerjaan sosial tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: *Social Case Work*, *Social Group Work* dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social Work Administration*, *Social Action* dan *Social Work Research*”. Tetapi pandangan semacam ini telah lama ditinggalkan, oleh karena itu digunakan dua pendekatan yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*).

Adapun penelitian ini termasuk dalam metode bantu pekerjaan sosial yaitu metode *Social Work Research*. Metode bantu *Social Work Research* (penelitian pekerja sosial) merujuk pada kegiatan penelitian terkait isu-isu sosial yang digarap oleh pekerja sosial, seperti misalnya melakukan penelitian tentang masalah-masalah sosial atau kebijakan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga penelitian ini mampu membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan sosial, dan kesejahteraan, hubungan-hubungan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi dengan kebijakan; serta melakukan pengamatan isu-isu sosial, sekaligus meningkatkan sensitivitas masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan di bidang ini.

Jadi, keterkaitan penelitian ini dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial ialah karena kajian tentang program Kartu Prakerja masih termasuk dalam garapan bidang Kesejahteraan Sosial. Ditambah lagi, penelitian mengenai isu-isu masalah sosial dan kebijakan-kebijakan tentang kesejahteraan sosial termasuk dalam metode bantu praktik pekerja sosial yaitu metode *social work research* (penelitian pekerja sosial)..

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan, adalah sebagai berikut :

Implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja dibagi dalam tiga indikator, yaitu:

1. Kebijakan program Kartu Prakerja, proses pelaksanaan program Kartu Prakerja sepenuhnya dilakukan secara daring atau online melalui website resmi Kartu Prakerja. Adapun alur pelaksanaan program dimulai dengan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi, kemudian jika dinyatakan lulus memilih dan mengikuti pelatihan berupa menonton video materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberi, kemudian setelah pelatihan selesai maka mengisi survey dan terakhir menunggu pencairan uang insentif yang masuk ke rekening masing-masing penerima program.
2. Organisasi atau kelompok pelaksana, pihak penyelenggara sudah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai meskipun tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, namun mampu menjalankan perannya sebagai partner dan membantu mensosialisasikan program Kartu

Prakerja di masyarakat serta membantu masyarakat yang kurang mengerti dalam proses pendaftaran program.

3. Kelompok sasaran, masyarakat memberikan respon positif terhadap dikeluarkannya program Kartu Prakerja ini. Namun, masyarakat masih mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan proses pelaksanaan program Kartu Prakerja di lapangan. Masalah tersebut dominan berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan secara daring. Mulai dari masalah jaringan internet, kecakapan digital masyarakat, serta video materi yang monoton dan terkesan membosankan. Sehingga pelaksanaan program Kartu Prakerja belum dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program Kartu Prakerja di Kota Binjai, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengoptimalkan pola asuh orang tua pada anak disabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara program diharapkan dapat mempersiapkan website yang menjadi wadah dilaksanakannya program Kartu Prakerja agar tidak terjadi error pada saat pelaksanaan pelatihan, ditambah lagi perlu adanya inovasi desain alur pelaksanaan program agar tidak terkesan membosankan dan monoton.
2. Penyelenggara program sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan monitoring secara langsung di masyarakat, sehingga pelatihan yang dilakukan masyarakat dapat terkontrol dan real, agar mengurangi kecurangan dan manipulasi data.
3. Masyarakat penerima Kartu Prakerja seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan kerja dengan sebaik mungkin, sehingga manfaat yang didapatkan masyarakat dapat maksimal dan tidak melenceng dari tujuan awal dibuatnya program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, Bapak Hamdani Hasibuan yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dan segala bimbingan yang telah diberikan. Tidak lupa rasa terima kasih kepada masyarakat Kota Binjai yang lolos dalam program Kartu Prakerja dan bersedia menjadi informan serta mau berpartisipasi dan bekerjasama dengan penulis untuk melaksanakan kegiatan ini. Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kegiatan ini hingga selesai

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 114-132.
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. (2020). *Proyeksi Penduduk (Jiwa), 2018-2020*. Dipetik Januari 17, 2023, dari Website Badan Pusat Statistik: <https://binjaikota.bps.go.id/indicator/12/36/1/proyeksi-penduduk.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2022*. Dipetik Januari 17, 2023, dari Website Badan Pusat Statistik: <https://binjaikota.bps.go.id/publication/2022/12/29/d4a81d6c0e4b59bf91e09aa4/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-binjai-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. Dipetik Januari 10, 2023, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 93-100.
- Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. (2020). *Data Penerima Kartu Prakerja*. Dipetik Januari 18, 2023, dari <https://disnaker.sumutprov.go.id/data-penerima-kartu-prakerja>
- Estrada, A. A., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan . *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 233-261.

- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 93-100.
- Estrada, A. A., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan . *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 233-261.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Imiah Wawasan Insan Akademik*, 13-26.
- HM, M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Al-Buhuts*, 42-66.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 201-208.
- Imronah. (t.thn.). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriterianya. 65-85.
- Muhyiddin, Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Warsida, Y. Y., & Yani, d. R. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Walfare-to-Work di Masa Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Pappers*, 1-17.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartu Prakerja. (2022, September 5). *Tentang Kartu Prakerja*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://www.prakerja.go.id/tanya-jawab/tentang-kartu-prakerja>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020, Oktober 26). *Tercatat Sebanyak 2.175.928 Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 (April - Agustus 2020)*. Dipetik Januari 11, 2023, dari Satu Data Ketenagakerjaan: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/55>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023, Januari 3). *Tenaga Kerja ter-PHK, November Tahun 2022*. Dipetik Januari 11, 2023, dari Satu Data Ketenagakerjaan: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/941>
- Nurhadi, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19. 1-10.
- Rachmah, D. S. (2020). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Sinaga, Risni. (2022). Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penerima Program Kartu Prakerja di Kabupaten Banyumas Tahun 2020) (Skripsi). Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifudin Zuhri, Purwokerto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.